

Rivalitas Purnawirawan Jenderal Militer Dalam Pemilihan Presiden 2019

Retirement Rivality Of The Military General In Selecting President 2019

Dea Arsyad Mujtahid Shibghotulloh

Universitas Padjadjaran
Jl. Raya Bandung Sumedang KM.21, Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kabupaten
Sumedang, Jawa Barat 45363

*corresponding author E-mail: deaarsyadms@gmail.com

Diterima: 26 September 2019 ; Direvisi: 25 November 2019 ; Disetujui: 26 November 2019

ABSTRAK

Telah tercatat tiga kali pemilihan presiden sejak 2004 untuk dipilih langsung oleh rakyat. Berbagai kekuatan politik tentu saja melekat dalam pertarungan politik, karena sebagai pemimpin negara dan pemerintahan, Presiden memiliki otoritas yang sangat besar, itulah sebabnya banyak pihak ikut serta dalam proses memenangkan pemilihan presiden. Tidak terkecuali bagi pensiunan jenderal militer yang terlibat dalam dunia politik praktis, mereka berpartisipasi dalam pemilihan Presiden. Dengan basis kekuatannya, tentu akan menarik ketika pensiunan jenderal militer mengeluarkan semua kekuatan mereka. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan mencari literatur dalam bentuk buku, jurnal dan makalah dengan analisis menurut Masri dan Sofian. tujuan dari artikel ini adalah untuk menyajikan peta kekuatan dan persaingan antara masing-masing perwira militer pensiunan yang ditemukan dalam dua kandidat untuk presiden Republik Indonesia 2019. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa kekuatan politik seorang pensiunan jenderal militer memiliki pengaruh sendiri, sebagaimana dibuktikan dari jaringan dan materi yang terkandung di dalamnya di kedua kandidat presiden 2019.

Kata kunci: Purnawirawan Militer, Pemilihan Presiden, Politik

ABSTRACT

It has been recorded three times the presidential election since 2004 to be elected by the people directly. Various political forces are certainly inherent in the political battle because, as the leader of the state and government, the President has such great authority, that is why many parties participate in the process of winning the Presidential election contestation. No exception for retired military generals involved in the world of practical politics, they participated in the election of the President. With its power base, it would certainly be interesting when retired military generals put out all their strength. This study uses a qualitative approach to data collection techniques by searching for literature in

the form of books, journals, and papers with analysis, according to Masri and Sofian. The purpose of this article is to present a map of strength and rivalry between each retired military officer found in the two candidates for the Republic of Indonesia 2019 president. The results of the study found that the political power of a retired military general has its influence, as evidenced by the network and the material contained therein in both 2019 presidential candidates.

Keyword: *Retired military general, Elections President, Politic*

PENDAHULUAN

Kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau yang dulu disebut dengan TNI ketika masa Orde Baru begitu besar dalam menentukan berbagai kebijakan Negara. Besarnya kekuatan TNI ini menjadi alat yang begitu ampuh dalam menegajawantahkan setiap keinginan dari penguasa. Karena statusnya sebagai kepanjangan tangan dari penguasa, TNI menjadi penyokong yang diperhitungkan dalam politik Nasional, salah satunya dalam menentukan dan memilih kandidat Presiden dan Wakil Presiden hingga beberapa periode. Dalam sejarahnya, tentara Indonesia mungkin dapat dikategorikan dalam tipologi tentara pretorian revolusioner yang memiliki kecenderungan kuat untuk berpolitik. TNI adalah tentara yang menciptakan diri sendiri, artinya bahwa mereka tidak diciptakan oleh pemerintah, juga tidak oleh suatu partai politik sebagaimana layaknya terjadi pada negara demokratis lainnya. Itu diartikan bahwa militer tidak akan ikut dalam campur tangan politik apabila pihak berkuasa mempunyai legitimasi yang kuat bagi masyarakat Nurhasanah Leni, Militer tidak akan ikut campur mengenai politik apabila sipil yang berkuasa memiliki legitimasi yang kuat..

Dalam historiografi sejarah awal militer Indonesia, Tentara Nasional Indonesia (TNI), hanya terdapat satu paradigma tunggal, yaitu bahwa TNI dibentuk dari rakyat yang sedang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda (Ikrar Nusa Bhakti, 1999). Kemunculan Tentara pada masa revolusi memang kurang diharapkan kehadirannya, “tentara Indonesia terbentuk, mempersenjatai diri dan mengorganisasi dirinya sendiri, hal ini terjadi akibat adanya keengganan pemerintah sipil pada waktu itu untuk menciptakan tentara(Salim Said, 2001)”.

Persoalan sipil dan militer (aktif) pada negara yang baru merdeka setelah Perang Dunia II telah sejak lama mendapat perhatian para ilmuwan. Tampak bahwa minat mereka untuk mengkaji persoalan sipil militer itu terkait pada kenyataan bahwa sejumlah negara-negara baru itu memilih sistem pemerintahan demokrasi. Namun pihak militer telah mengambil kedudukan penting dan menentukan dalam gelanggang politik. Hasil kajian yang dilakukan para ilmuwan tersebut menarik untuk diperhatikan dalam mengkaji lebih lanjut hubungan sipil-militer dalam sejumlah negara, yang memilih sistem pemerintahan demokrasi, termasuk negara kita, Republik Indonesia (Kardi, 2015).

Namun, seiring perjalanan bangsa, dengan kekuatan yang dimiliki oleh tentara, penguasa pada masa orde baru yang juga memiliki latar belakang tentara, membuat TNI sengaja “dipelihara” oleh penguasa karena kekuatannya yang tidak dimiliki oleh kelompok lain dan sangat sulit untuk ditaklukan oleh pihak lain, kecuali oleh penguasa itu sendiri. “Tindakan terhadap militer tersebut oleh sebagian kalangan menunjukkan bahwa bagaimanapun militer merupakan kelompok kepentingan institusional yang tidak bisa diabaikan dalam percaturan politik Indonesia” (Ikrar Nusa Bhakti, 1999) Dinamika yang terjadi tersebut menjadi bagian yang perlu dipahami sebagai catatan sejarah yang menjadi ciri khas dari fase orde Baru.

Sebagaimana diketahui bersama militer di hampir seluruh dunia memiliki andil dalam proses konsolidasi demokrasi. Militer di Indonesia dalam sejarahnya tentang politik, disamping berperan dalam proses kemerdekaan, di sisi yang lain juga berperan proses konsolidasi dalam irisan kekuatan politik di Indonesia. Terbukti sejak Gerakan Reformasi 1998 di Indonesia telah mendorong terjadinya perubahan peran militer dalam politik, berupa reformasi internal Tentara Nasional Indonesia tahun 1999 (reformasi TNI). Melalui reformasi ini terjadi proses penarikan diri institusi militer dari politik. Wujud paling nyata adalah penghapusan Dwi fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (TNI) (Sebastian, n.d.).

Dikarenakan dihapusnya dwi fungsi TNI, maka sudah habislah peran tentara aktif untuk berpolitik. Sepak terjang pensiunan jenderal tentara pasca reformasi memiliki kekhasannya sendiri. Pensiunan tentara atau dalam hal ini lebih spesifiknya purnawirawan jenderal militer diartikan sebagai seorang militer berpangkat jenderal yang sudah tidak memiliki beban tugas sebagai pasukan pertahanan negara, atau lebih umumnya disebut sebagai pensiunan jenderal tentara.

Masa bakti sebagai militer yang berdurasi 39 atau 40 tahun sebagai pasukan serdadu negara, dimanfaatkan selain untuk menjaga keutuhan negara, juga secara implisit terlihat dimaksimalkan dalam pertarungan kontestasi politik baik di tingkat lokal atau pusat. Bisa dimaknai bahwa purnawirawan jenderal militer adalah individu atau kelompok yang bisa diajak berdemokrasi secara pemilu atau hal lainnya. Demikian jelas dan penting peranan politik tentara ketika itu sehingga sangat masuk akal apabila dikatakan bahwa karakteristik yang paling mencolok dalam masa itu adalah adanya dualisme kepemimpinan, yaitu militer dan politik. Militer dan politik memiliki ikatan yang begitu erat dalam proses kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Keterlibatan purnawirawan TNI bukan hal baru itu dapat dilihat dari banyaknya calon anggota legislatif dan eksekutif dari seseorang yang berlatar belakang TNI/Purnawirawan (Anggoro, 2019).

Berbeda dengan militer yang diterangkan di atas, pensiunan militer atau disebut juga dengan purnawirawan jenderal militer melakukan kegiatan politik praktis dalam pemilu. Di Indonesia sejak pilpres 2004 barisan jenderal purnawirawan militer berebut untuk menjadi nomor satu di republik Indonesia, perwira tinggi yang dulunya menjaga korsa, kini mengincar posisi presiden ataupun wakil presiden dan jajaran di sekelilingnya. Seakan ingin mengulang kesuksesan di zaman soeharto. Perebutan posisi strategis diantara purnawirawan jenderal militer untuk mendapatkan kursi paling tinggi di Indonesia, menimbulkan gesekan dari berbagai faksi kekuatan di dalamnya atau dengan Bahasa lain diistilahkan rivalitas. Artikel ini hanya mengambil

masing-masing satu purnawirawan jenderal militer untuk dijadikan sampel kekuatan dari kedua kandidat. Menjadi pertanyaan adalah apa sebenarnya yang dimiliki oleh purnawirawan jenderal militer sehingga mereka selalu dijadikan barisan yang cukup diperhitungkan.

Walaupun dari kedua pasangan capres dan cawapres pada pemilu 2019 terdapat satu orang yang berlatar belakang sebagai purnawirawan jenderal militer, artikel ini tidak akan membahas sang kandidat tersebut. Namun lebih difokuskan pada purnawirawan jenderal militer yang menjadi tim sukses dari pasangan capres dan cawapres. Tujuan dari artikel ini tak lain adalah untuk melihat sisi rivalitas kekuatan kandidat presiden dalam kontestasi pemilihan presiden 2019 di Indonesia yang menggunakan unsur purnawirawan jenderal militer sebagai salah satu kekuatan politik dalam mendongkrak elektabilitas.

METODE PENELITIAN

Penelitian tentang politik purnawirawan jenderal militer ini menggunakan metode penelitian kualitatif atau kepustakaan (*library research*), pengumpulan datanya ialah melalui dokumentasi, yaitu pengumpulan data dilakukan dengan mencari literatur dalam bentuk buku, jurnal, makalah, serta berita dari media *mainstream* dan lain sebagainya yang membahas tentang purnawirawan jenderal militer dalam pilpres. Kemudian dalam pembahasannya, penelitian ini menggunakan pembahasan secara deskriptif-analitis. Dimana bertujuan untuk membuat gambaran terhadap data-data yang telah terkumpul dan tersusun dengan cara memberikan interpretasi terhadap data tersebut (Masri & Effendi, 1989).

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Andre Heywood berbicara politik sebagai kekuasaan, bahwa dalam wujudnya yang luas, politik berkenaan dengan produksi, distribusi dan penggunaan sumber daya dalam kehidupan sosial. Politik, pada dasarnya, adalah kekuasaan; kemampuan untuk mencapai hasil yang diinginkan, apapun caranya. Dalam perspektif ini, politik adalah tentang keragaman dan konflik, tetapi intinya adalah adanya kelangkaan: fakta sederhana bahwa, sementara kebutuhan dan keinginan manusia tidak terbatas, sumber daya yang tersedia

untuk memuaskan selalu terbatas. Politik karenanya dapat dipahami sebagai perjuangan untuk memperoleh sumber daya yang langka, dan kekuasaan dapat dipahami sebagai sarana melalui dimana perjuangan ini dilaksanakan (Andrew Heywood, 2014). Dalam pengertian di atas bisa dilihat bahwa kekuasaan yang menghendaki akan adanya faktor sumber daya yang dimaksimalkan dalam merebut kekuasaan, purnawirawan jenderal militer dapat diposisikan sebagai sumber daya yang simbiosis mutualisme dengan pihak diluar militer dalam hal ini sipil untuk kepentingan politik.

Ada pernyataan yang cukup terkenal: "*Jenderal is never die the just it away*", yang berarti jenderal akan tetap jenderal walaupun purnawirawan. Begitulah adagium yang masyhur dalam tataran militer. Ketika seorang militer diplot sebagai pasukan militer yang berpangkat jenderal, maka sudah pasti titel jenderal akan selalu melekat walaupun tentara itu sudah tidak aktif alias pensiun. Dalam setiap belahan negara di dunia, jabatan pemerintahan seakan tak bisa lepas dari jajaran purnawirawan jenderal militer. Ikut sertanya pensiunan militer ini akan menimbulkan pertanyaan apakah dapat memberikan kualitas demokrasi yang lebih bagus dari sebelumnya atau tidak, juga apakah pengaruh elektoral dalam setiap kontestasi politik Akan berdampak pada segmentasi yang mana, apakah orang tua saja atau generasi muda.

Beberapa pertanyaan yang timbul di atas sudah menjadi wajar dikemukakan dalam setiap diskursus militer dan politik. Namun lebih dari itu, pembahasan di sini akan lebih menitikberatkan pada duel, pertarungan, dan juga rivalitas diantara kubu-kubu purnawirawan jenderal militer yang berbeda dalam mendukung pasangan calon kepala pemerintahan, dalam hal ini presiden.

Sebagaimana kita ketahui, perwujudan peran militer dalam politik Indonesia telah melewati perjalanan panjang, dan keterlibatan militer dalam politik senantiasa mengalami pasang surut. Menurut Bilver Singh, bahwa keterlibatan militer dalam bidang non militer (politik) disebabkan oleh faktor-

faktor internal dan eksternal. Faktor-faktor internal tersebut terdiri dari; nilai-nilai dan orientasi para perwira militer, baik secara individu maupun kelompok, serta kepentingan-kepentingan material korps militer, Peran ini semakin mereka gunakan setelah mereka mendapat titel sebagai purnawirawan militer (jenderal). Karena mereka sadar semenjak dwi fungsi TNI dihapuskan, mereka hanya bisa berpolitik berpraktis setelah pensiun dari tentara(Kadarsih & Sudrajat, 2011).

Dalam perkembangannya politisi sipil mendorong politisi purnawirawan TNI untuk menerapkan kapabilitasnya dalam bidang militer, seperti penguasaan teritorial, untuk menggerakkan mesin partai. Dengan kata lain, lemahnya infrastruktur demokrasi telah mendorong purnawirawan jenderal militer untuk memanfaatkan keahlian strategi militernya dalam rutinitas politik. Hubungan militer (purn) dengan sipil dalam politik bisa dibidang untuk mengisi kekosongan satu sama lain demi mencapai tujuan bersama dalam politik -untuk tidak mengatakan saling memanfaatkan (Kardi, 2015).

Ada dua pandangan mengenai masuknya purnawirawan jenderal militer dalam gelanggan politik praktis, *pertama*, masuknya purnawirawan jenderal militer ke dalam politik praktis merupakan bagian dari upaya menguasai pemerintahan melalui mekanisme demokrasi, dan bukan untuk menegakkan demokrasi itu sendiri. Pandangan ini menganggap bahwa sarana pemilu adalah batu loncatan untuk mengkooptasi kekuasaan di pemerintah. Adapun pandangan *kedua*, mengatakan bahwa para purnawirawan jenderal militer yang masuk ke ranah politik memiliki pengaruh positif terhadap proses konsolidasi demokrasi di Indonesia. Hal ini terutama karena politisi purnawirawan jenderal militer menganut politik negara yang memegang teguh NKRI, Pancasila, dan konstitusi (UUD 1945), dengan salah satu implementasinya adalah upaya untuk menegakkan konstitusi sebagai satu-satunya aturan yang sah. Dari kedua pandangan diatas, penulis berpendapat mengenai purnawirawan jenderal militer dalam mengikuti gelanggang politik

adalah karena untuk menguatkan posisi mereka selepas dari korsa militer, karena dalam politik itu melekat tentang kekuasaan, maka dari itulah mereka ingin bisa melakukan suatu hal demi eksistensinya dan dengan nilai-nilai demokratis.

Karena pilpres 2019 adalah pertarungan sumber daya sebagaimana menurut Heywood tentang politik sebagai kekuasaan, maka sudah barang tentu, para kandidat menyiapkan strategi dan taktik demi kemenangan dan itu adalah sebuah keniscayaan. Strategi yang dilakukan adalah melihat dari apa saja unsur kekuatan yang patut dipersiapkan, untuk digunakan dalam kontestasi pilpres. Kekuatan bisa dari unsur mana saja, tak terkecuali dari purnawirawan jenderal militer. Mereka menjadi pendukung pasangan calon presiden, merupakan hal lumrah karena secara skala nasional purnawirawan jenderal militer memiliki pengalaman dan jaringan dari berbagai institusi militer selama mereka aktif.

Sebagai pensiunan jenderal militer, tentu komunikasi diantara mereka yang sudah tidak aktif ataupun dengan yang masih aktif sebagai prajurit militer masih dijaga dengan institusi yang dulu mereka naungi. Di dalamnya terdapat jaringan yang dapat dimanfaatkan dalam proses peningkatan elektoral sebagai kandidat ataupun mereka berposisi sebagai pendukung terhadap kandidat lain. Karena pertarungan pilpres 2019 merupakan episode kesekian yang melibatkan purnawirawan jenderal militer, maka tentu ada maksud terselubung atau secara terang-terangan para purnawirawan tersebut dalam merebut kekuasaan.

Sejumlah purnawirawan TNI saat ini tergabung dalam tim sukses dua calon presiden. Yang jadi lebih menarik adalah diantara purnawirawan jenderal militer tersebut tidak satu komando untuk mendukung satu pasangan calon dalam pemilu, dalam hal ini pilres 2019. Ada dua kelompok yang terbelah pada pilpres 2019 yang kemudian secara otomatis menimbulkan rivalitas antar purnawirawan jenderal militer di dalamnya. Dari dua pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pilpres 2019, masing-masing memiliki

basis tim pendukung dari latar belakang purnawirawan jenderal militer. Calon presiden Jokowi dan calon presiden Prabowo adalah pertarungan ulang sejak pilpres 2014, dengan perbedaan komposisi pada calon wakil presidennya masing-masing. Pasukan pendukung purnawirawan jenderal militer pada tahun 2014 dan tahun 2019, terdapat penambahan dan juga pengurangan dengan berbagai alasan, apakah itu purnawirawan jenderal militer yang sebelumnya belum mengikuti perhelatan pilpres, atau karena perpindahan dukungan dari masing-masing pasangan calon presiden.

Efektifitas purnawirawan jenderal militer menurut Muradi tidak seratus persen bisa menjamin kemenangan, dia melihat sisi simbol dan kekuatan logistik lah yang menjadi penyokong utamanya. Ada kecenderungan bahwa purnawirawan jenderal militer hanya sebagai penguat logistik dalam proses pemenangan pasangan calon presiden. Terlepas dari pandangan para pengamat mengenai pengaruh purnawirawan jenderal militer dalam konstelasi politik pilpres 2019, kedua pasangan calon tetap menggunakan jasa purnawirawan jenderal militer untuk masuk menjadi bagian dari suksesi pemenangan pilpres 2019. Dalam rilis yang disampaikan oleh KPU tentang daftar nama-nama yang masuk menjadi tim kampanye pasangan calon presiden ada nama-nama purnawirawan jenderal yang terlibat (Pengumuman KPU).

Dalam daftar tim kampanye nasional (TKN) Joko Widodo - Ma'ruf Amin terdapat beberapa purnawirawan jenderal militer berikut tabel purnawirawan yang mengikuti pasangan calon presiden.

Tabel.1 Purnawirawan dalam Team Pemenangan masing - masing calon

Jokowi (TKN)	
Nama	Jabatan Struktur TKN
Jenderal (purn) Moeldoko	wakil ketua umum TKN
Jenderal (purn) Wiranto	pelaksana kampanye TKN
Jenderal (purn) Tris sutrisno	anggota dewan pengarah TKN
Laksmana (purn) Marsetyo	anggota dewan pengarah TKN
Letjen (purn) Loedwijk	wakil ketua umum TKN
Brigjen (purn) Herwin Supardjo	wakil direktur kampanye TKN
Prabowo (BPN)	
Jenderal (purn) Djoko santoso	ketua BPN
Jenderal (purn) Susilo Bambang Yudhoyono	Koordinator juru kampanye BPN

Laks (purn) Tedjo Edi	wakil ketua dewan penasihat BPN
Letjen (purn) Yunus yosfiah	dewan penasehat BPN
Laksmana Madya (purn) Muklas Sidik	dewan pengarah BPN
Mayjen Yudi Bagio Yusuf	wakil ketua BPN
Mayjen (purn) Arifin Seman	direktur monitoring analisa dan evaluasi BPN
Letjen (purn) Yayat Sudrajat	direktur pengamanan dan pengawasan BPN
Mayjen (purn) Glen Kairupan	direktur teritori dan operasi BPN

Sumber : KPU.go.id, diolah oleh peneliti 2019

Dari sekian nama-nama pensiunan jenderal diatas, tentu itu adalah pesan yang ingin disampaikan kepada masing-masing pasangan calon dan masyarakat, bahwa pasangan calon presiden mereka diperkuat para purnawirawan jenderal militer yang punya pengalaman strategi militer, logistik, dan jaringan, dan juga intelijen yang akan membuat lawan menjadi ketar-ketir. Komposisi nama-nama dalam struktur Purnawirawan jenderal militer antara kubu Jokowi dan Prabowo, praktis lebih banyak dimiliki oleh pihak Prabowo, namun perlu dicatat itu tidak menjadi ukuran bahwa semakin tentang presentasi kemenangan. Hanya secara psikologi dapat membantu keyakinan bahwa pensiunan jenderal militer berada di pihak kandidat.

Purnawirawan jenderal militer dalam pilpres 2019, tentu dengan sendirinya terbelah, secara perorangan ataupun kelompok bergabung satu dengan yang lainnya dalam tim ataupun tidak terstruktur dalam tim kampanye pasangan capres. Dalam konteks Jokowi dan Prabowo, penulis melihat ada kekuatan purnawirawan jenderal militer bintang 4 yang kini berpengaruh dalam memenangkan pasangan calonnya masing-masing. Penulis berpendapat bahwa masing-masing satu purnawirawan jenderal dari kubu Jokowi ataupun Prabowo bisa menjadi representasi simbol kekuatan masing-masing calon. Dari kubu Jokowi terdapat Luhut Binsar Panjaitan dan di pihak Prabowo memiliki Susilo Bambang Yudhoyono. Itulah menjadi alasan penulis mengambil masing-masing satu nama dari kedua kandidat untuk dijadikan corong kekuatan purnawirawan jenderal militer dalam pilpres 2019, yang mempunyai ketokohnya masing-masing pula.

Purnawirawan Jenderal Militer dalam Jokowi

Sebagai Presiden Republik Indonesia, Jokowi memiliki kekuatan dalam

mengelola pasukan militer dari simpul paling tinggi hingga simpul paling bawah. Menghadapi pilpres 2019, Jokowi tentu memiliki sumber daya yang mumpuni karena posisinya sebagai petahana. Peluang untuk memenangkan pertarungan pemilihan presiden pada 2019 sangat besar. Dengan digandengnya tokoh ulama Indonesia sebagai calon wakil presiden, sudah cukup menutup persepsi bahwa Jokowi anti Islam atau setidaknya tidak dekat dengan Islam.

Tidak cukup dengan menutup opininya yang tidak dekat dengan Islam, Jokowi perlu dan sangat membutuhkan sokongan dari unsur lain demi membangun kekuatan yang paripurna untuk memenangkan kontestasi pemilihan Presiden 2019. Unsur yang diajak kerjasama dengan Jokowi-Ma'ruf adalah purnawirawan jenderal militer yang baru pensiun atau sudah lama non aktif dalam struktur militer. Purnawirawan jenderal militer dengan Jokowi-Ma'ruf adalah sifatnya saling membutuhkan dan menguntungkan.

Luhut Binsar Panjaitan

Di barisan tim pemenangan Jokowi-Ma'ruf, menurut Aris Santoso, para mantan jenderal mendapatkan posisi karena kedekatan personal dengan Presiden Jokowi. Salah satunya adalah Luhut Binsar Pandjaitan. Komandan Pendidikan dan Pelatihan TNI AD itu adalah rekan bisnis Joko Widodo. Penulis mengambil sosok Luhut Binsar Panjaitan sebagai Purnawirawan jenderal militer yang berpengaruh dalam suksesi Jokowi jauh sebelum pilpres 2019 mendatang. Walaupun Luhut tidak masuk dalam struktur Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, bukan berarti peran Luhut tidak diperhitungkan, justru dengan disimpannya luhut diluar struktur tim kampanye, membuat ia lebih leluasa dalam mengatur strategi disamping posisi dia sebagai menko kemaritiman saat ini. Menurut Salim Said, ahli militer terkemuka mengatakan, Leonardus Benny Moerdani (LB Moerdani) yang dianggap sebagai Raja Intelijen Indonesia mempunyai seorang anak kesayangan atau anak emas yaitu Luhut Binsar Pandjaitan (LB Panjaitan). Pernyataan Salim Said yang juga mengutip Adam Schwarz adalah sebagai berikut:

“Berbeda dengan panglima-panglima sebelum dan sesudahnya, Benny (Moerdani) memang memelihara sejumlah orang yang disenanginya. “Mereka itu semacam *golden boys* Benny Moerdani,” kata Schwarz. Salah satu yang dikenal sebagai “anak emas” itu adalah Luhut Binsar Pandjaitan (Said, 2013)”.

Kolumnis *Reuters*, Kanupriya Kapoor dalam tulisannya pada Agustus 2015, sebagaimana dikutip dari media pinterpolitik, menyebut Luhut Binsar Pandjaitan sebagai ‘*one of the country’s powerful men*’ karena pengaruhnya dan jabatannya saat itu sebagai Kepala Staf Kepresidenan –posisi yang baru ada pada pemerintahan Jokowi. Luhut dijuluki sebagai ‘*the gatekeeper*’ – penjaga gerbang– bagi Jokowi, bukan hanya karena latar belakang militer, tetapi juga *skill* ekonomi mumpuni yang dimilikinya (pinterpolitik). Kini, secara politis, posisi Menko Kemaritiman yang kini disandangnya adalah posisi yang sangat penting dan mungkin menjadi salah satu capaian tertinggi Luhut dalam kariernya.

Banyak pengamat politik Indonesia menganggap jika bukan karena Luhut, maka pemerintahan Jokowi tidak akan mungkin bisa kuat menghadapi tekanan politik, termasuk dari partai-partai pendukung. Secara garis besar, keputusan Jokowi menunjuk beberapa purnawirawan militer dalam kabinetnya sesungguhnya menunjukkan cara presiden “terlemah setelah Gus Dur” ini untuk menyeimbangkan kekuatan politik. Luhut bahkan berani mengambil resiko enggan menerima tawaran mengisi jabatan Partai Golkar untuk mendukung Jokowi pada Pilpres 2014. Sebab kala itu Partai Golkar tidak mengusung Jokowi sebagai capres.

Menghadapi pilpres 2019, Luhut merupakan sosok yang bisa mengakomodir berbagai kepentingan apakah itu partai politik atau kelompok organisasi. Kepiawaiannya dalam membuat sebuah tim demi suksesi politik Jokowi, mendapat apresiasi yang baik dari internal tim kampanye. Terbukti pada 2014 dia mendirikan sebuah tim yang diberi nama cakra 19 yang bertugas untuk menghimpun para purnawirawan jenderal militer dalam pilpres pada 2014 lalu. Dan tim itu kini diaktifkan kembali dengan komposisi yang lebih terstruktur (walaupun tidak menjadi bagian dari TKN yang resmi didaftarkan kepada KPU) yang bergerak secara kultural dan menjaring semua

elemen sebagai target suaranya. Cakra 19 adalah 19 purnawirawan jenderal militer bekas anak buah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan yang membentuk tim pemenangan sendiri bernama Cakra 19. Tim tersebut dipimpin oleh mantan Menteri Sekretaris Kabinet, Andi Widjajanto, yang juga putra Mayjen TNI (Purn) Theo Syafei. Salah satu anggotanya adalah mantan Komandan Jenderal Kopassus Letjen TNI (Purn) Lodewijk F. Paulus (kompas). Berbeda dengan divisi pemenangan lainnya, baik Bravo 5 maupun Cakra 19 memiliki tugas khusus yakni memenangkan Jokowi dalam pilpres 2019 di wilayah Jawa Barat.

Purnawirawan Jenderal Militer dalam Prabowo

Sebagai seorang purnawirawan jenderal militer, Prabowo Subianto merupakan kandidat satu-satunya yang bertarung dengan latar belakang militer. Dengan pengalamannya sendiri sebagai prajurit elit, Prabowo sudah sejak tahun 2009 bergelut dalam pilpres, ketika itu dia menjadi calon wakil presiden berpasangan dengan Megawati. Dalam menghadapi pilpres 2019, Prabowo mengerahkan para purnawirawan jenderal militer demi menyukseskan hasratnya sebagai orang nomor satu di negeri ini. Dengan adanya deklarasi sebanyak 60 purnawirawan TNI telah menyatakan dukungannya. Mereka mendeklarasikan dukungannya tersebut pada Sabtu (9/6/2018). Hal tersebut terungkap setelah video deklarasi mereka diunggah Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon ke akun Twitter pribadinya, Kamis (2/8/2018) (twitter @fadlizon). Kubu Prabowo, sebagaimana disebut diatas, komposisi purnawirawan jenderal militer memang terasa lebih kental, bagi penulis itu hal yang wajar, karena Prabowo adalah purnawirawan jenderal militer juga. Dari sekian nama yang masuk Badan Pemenangan Nasional (BPN), ada satu purnawirawan jenderal militer yang patut dijadikan salah satu aktor sentral, yaitu sosok Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Susilo Bambang Yudhoyono

Sepak terjang SBY sudah tidak bisa diragukan lagi dalam alam politik Indonesia, dua kali pilpres sudah menjadi bukti jurus ampuh

bagaimana SBY bisa memenangkan dan menjatuhkan lawan. Prabowo harus banyak belajar kepada SBY dalam mengarungi pertarungan politik tingkat nasional. Suatu angin baik adalah kesediaan SBY untuk berkoalisi dengan Prabowo dalam pilpres 2019, itu adalah sinyal bahwa dua kekuatan sedang bersekutu untuk memenangkan pilpres 2019. Pengalaman SBY sebagai presiden republik Indonesia dua kali, membuktikan bahwa SBY adalah petarung yang sukses dalam memenangkan pilpres sebanyak dua kali berturut-turut yaitu 2004-2009 dan 2009-2014.

Pada struktur BPN Prabowo, SBY masuk menjadi koordinator juru kampanye. Suatu posisi yang strategis karena memang sesuai dengan kapasitasnya pandai memimpin. Dengan posisi sebagai ketua umum partai juga, SBY jelas memiliki pasukan purnawirawan jenderal tersendiri di tubuh partainya. Jaringan yang ia miliki selama menjadi presiden dua kali tentu akan sangat berpengaruh, dan yang menjadi catatan penting juga adalah bahwa kekuatan logistik SBY tidak bisa dianggap sebelah mata.

SBY merupakan purnawirawan jenderal yang terbilang paling sukses jebolan dari orde baru. Mengapa? Dia pernah menjadi Menkopolhukam, kemudian mendirikan partai Demokrat yang sukses mengantarkannya sebagai penguasa selama sepuluh tahun (2004-2014). Kiprahnya itulah yang sangat seksi untuk dianalisis kaitan sebagai barisan BPN Prabowo dalam pilpres 2019. Penulis melihat bahwa kekuatan SBY tentu akan dikeluarkan dengan semaksimal mungkin, karena dia tidak mau jika haluan politik yang dia tentukan kalah pertarungan pilpres. Hal itu akan berimbas pada kepentingan dirinya dan partainya dalam mengarungi samudera politik Indonesia kedepannya.

Unsur lain yang perlu diperhitungkan adalah posisi SBY sebagai ketua umum partai Demokrat. Dengan kekuasaan yang dimilikinya di dalam sebuah partai yang berjejaring di seluruh Indonesia, maka itu menjadi salah satu modal utama lainnya ketika mesin partainya yang dijadikan senjata elektoral SBY dalam memenangkan Prabowo -termasuk menaikkan elektabilitas

partainya.

Berpijak pada hal itu, maka wajar jika SBY siap bertempur walaupun dengan sesama purnawirawan jenderal militer lainnya, yang berseberangan dengan dirinya dalam dukung mendukung pasangan calon presiden dalam pilpres 2019. Dengan latar belakang sebagaimana paparan diatas, perlu kiranya kita memahami bahwa ada agenda kepentingan lain dari SBY disamping memenangkan Prabowo-Sandi. SBY berharap bahwa investasi politiknya di koalisi Prabowo, bisa menaikkan daya tawar keturunannya sebagai pemimpin bangsa.

Itu terlihat dari bagaimana ia menyiapkan masa depan partai Demokrat untuk diberikan kepada keturunannya. Dengan posisi seperti itu maka SBY ingin melanggengkan kekuasaannya sembari bertempur dalam memenangkan Prabowo. Secara kasat mata, diusungnya AHY memang tidak bisa dilepaskan oleh peran SBY yang notabene adalah ayah kandungnya. Namun, di luar kepentingan pribadi yang dibawa SBY, penulis tidak melihat itu sebagai halangan akan adanya pertempuran purnawirawan jenderal militer dalam pilpres 2019. Karena apapun motifnya, dukung-mendukung pensiunan militer dalam pilpres yang dilakukan oleh SBY adalah sebuah sikap politik yang jelas dalam pilpres 2019.

SIMPULAN

Rivalitas purnawirawan jenderal militer dalam pertarungan pilpres 2019, merupakan sebuah bukti bahwa pilpres adalah suatu momentum untuk meningkatkan daya kekuatan dan menguatkan eksistensi mereka dalam beradu strategi. Kekuatan Jokowi dan Prabowo bisa direpresentasikan purnawirawan jenderal militer, yaitu masing-masing oleh Luhut Binsar Panjaitan dan Susilo Bambang Yudhoyono. Dua purnawirawan jenderal militer yang terakhir berpangkat jenderal selama menjadi kekuatan masing-masing kubu. Rivalitas purnawirawan jenderal militer di antara kubu Jokowi dan Prabowo perlu diwaspadai untuk memastikan para purnawirawan jenderal militer tidak menggunakan senioritasnya dan kultur *esprit de corps* (rasa keterikatan diantara militer) untuk mengarahkan suara dan dukungan

TNI untuk kandidat calon presiden yang tengah berkontestasi. Batasan itu perlu dikemukakan karena jika kontestasi pilpres melibatkan pasukan tentara aktif akan sangat membahayakan bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Di tambah Indonesia mempunyai pengalaman buruk ketika militer ikut ambil bagian dalam setiap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah ataupun legislatif ketika zaman orde baru yang otoriter. Terlebih jika dua kekuatan purnawirawan jenderal berseteru pada ranah yang lebih ekstrim yaitu dengan melakukan pengerahan pasukan bersenjata, maka sudah dipastikan masyarakat adalah korbannya. Dengan kata lain kita harus menjaga jangan sampai purnawirawan jenderal militer di satu sisi mampu menjaga militer agar tetap pada jalurnya, atau justru purnawirawan jenderal militer itulah yang nantinya membangun basis masa di militer dan kemudian terjadi kompetisi yang tidak konstruktif bagi perkembangan demokrasi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrew Heywood. (2014). *Politik. Alih Bahasa: Ahmad Lintang Lazuardi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Anggoro, T. (2019). Politik Patronase dan Klientelisme Purnawirawan Tni Pada Pemilu Legislatif. *Jurnal Ilmu Pemerintahan: Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*, 4(1), 64–74.
- Ikrar Nusa Bhakti. (1999). *Tentara Mendamba Mira: Hasil Penelitian LIPI tentang Pasang Surut Keterlibatan ABRI dalam Kehidupan Kepartaian di Indonesia*. Bandung.
- Kadarsih, S., & Sudrajat, T. (2011). Analisis Terhadap Hak Pilih TNI dan Polri dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(1), 48–61.
- Kardi, K. (2015). Demokratisasi Relasi Sipil–Militer pada Era Reformasi di Indonesia. *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi*, 231–256.
- Masri, S., & Effendi, S. (1989). Metode penelitian survei. *LP3Es, Jakarta*.
- Nurhasanah Leni. (2013). Keterlibatan Militer Dalam Kancan Politik Di Indonesia. *Jurnal Tapis*, 9 No.1, 1.
- Said, S. (2013). *Dari Gestapu Ke Reformasi, Serangkaian Kesaksian*. Bandung: Mizan.

Salim Said. (2001). *Tentara Nasional Indonesia Dalam Politik: Dulu, Sekarang dan Masa Datang*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Sebastian, L. C. (n.d.). Iisgindarsah,(2013),“. *Taking Stock of Military Reform in Indonesia*”, in Rüländ, J., Manea, MG and Born, H.(Eds), *The Politics of Military Reform Experiences from Indonesia and Nigeria*, Springer, New York, NY, 29–56.